

## Catatan dan rekomendasi atas LKPJ Gub DIY TA 2018

Oleh : Imam Sujangi

Untuk memberi catatan dan rekomendasi atas LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Gubernur ( Pemda ) sebagaimana telah di tampilkan dalam Tabel 4.1 ( hal 4-2 ). Dari 14 IKU ada 4 IKU yang tidak tercapai, sementara sisanya yakni 10 IKU tercapai. Empat IKU yang tidak tercapai adalah; Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ), Indeks Gini, Prosentase Angka Kemiskinan dan Indeks Ketimpangan Wilayah ( Williamson ). Berbeda dengan IKU tahun 2017 yang jumlahnya 17 IKU. Dengan capaian; 10 IKU tercapai, 5 IKU tidak tercapai dan ada 2 IKU yang tidak bisa di nilai.

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) DIY yang mencapai angka 79.59 dari target 80.29 ( relaisasi 99.13% ) perlu diapresiasi. Sebab dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0.7 atau secara prosentase naik sebesar 0.887% . Selain itu pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2016 mencapai rekor dengan angka pertumbuhan 6.2% lebih tinggi dibanding angka nasional. Namun ada beberapa indikator penting yang setiap tahun menjadi catatan dan rekomendasi DPRD yakni Angka Kemiskinan, Indeks Ketimpangan ( Gini ) dan Indeks Ketimpangan Wilayah ( Williamson ) yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Tahun 2018, angka kemiskinan sampai dengan September 2018 sebesar 11.81% dari target yang direncanakan sebesar 11.23% ( realisasi 94.83% ). Garis Kemiskinan ( GK ) per September adalah 414.899. Angka 11.81% tersebut ekivalen dengan jumlah penduduk miskin 450.250 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16.080 orang. Dan jika menggunakan indikator jumlah penduduk miskin, target 2018 tercapai karena di patok target 484.947 jiwa. Realisasi jumlah penduduk miskin versus target adalah 107.7%. Dengan demikian maka laju rata-rata penurunan kemiskinan selama Sept 2013 – Sept 2018 adalah sebesar 0.644%.

Sebagai perbandingan angka kemiskinan nasional per September 2018 adalah 9.66%. jika dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa maka DIY termasuk yang paling tinggi. Jawa Tengah 11.81%, Jawa Timur 11.19%, Banten 10.85%, Jawa Barat 7.25% dan DKI sebesar 3.55%. Jika kita melihat angka kemiskinan per kabupaten/kota terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan antara wilayah kota Jogja ( 6.98% ) dan Kabupaten Sleman ( 7.65% ) dengan tiga kabupaten yang lain yaitu Bantul ( 13.43% ), Gunungkidul ( 17.12% ) dan Kulonprogo ( 18.30% ) seperti terlihat pada Tabel 4.4 ( hal 4-9 ) LKPJ 2018.

Dari sisi kemampuan keuangan faktanya dari tahun ketahun selalu meningkat. Kemampuan keuangan pemda DIY terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Demikian juga anggaran dari sumber Dana Keistimewaan ( Danais ) yang juga naik dari tahun ketahun.

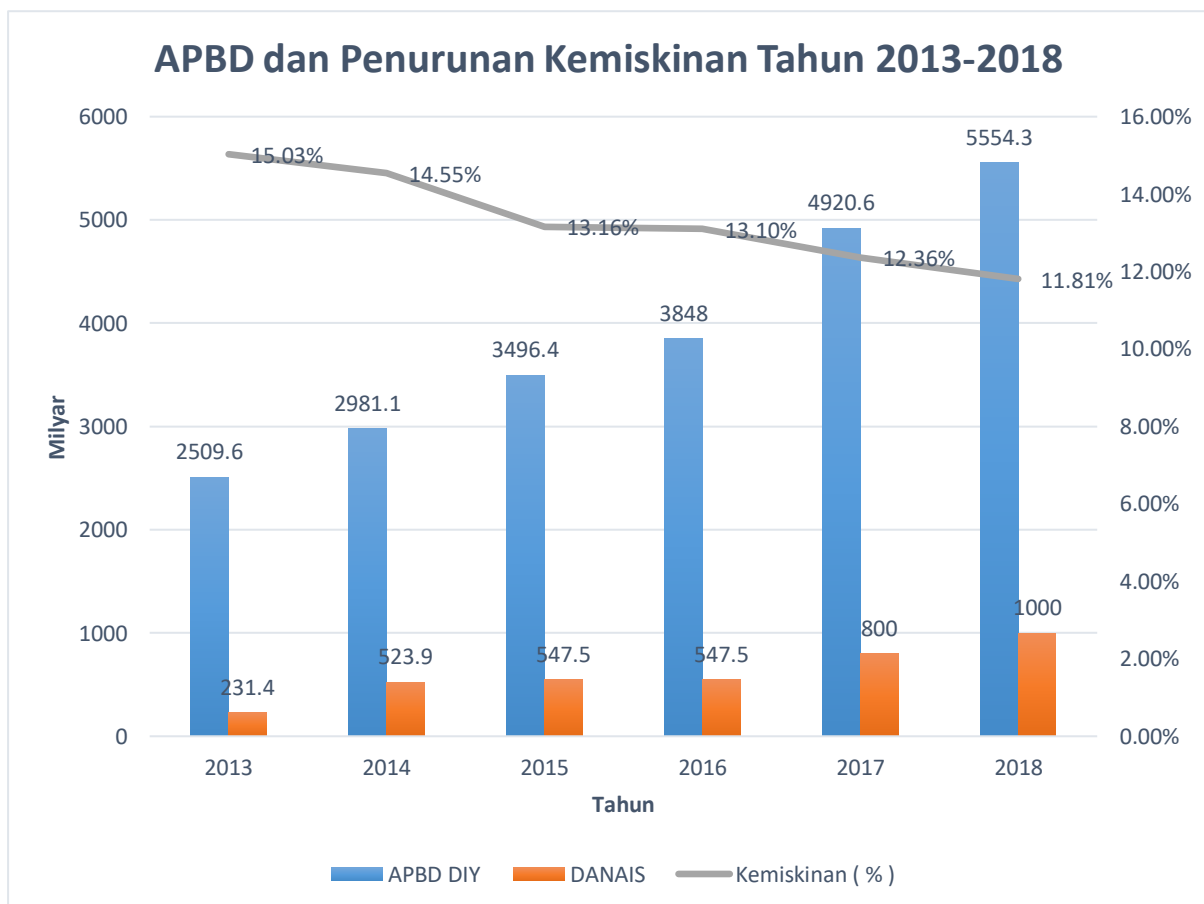
| TAHUN      | APBD DIY          | DANAIS       | Kemiskinan ( % ) | Laju |
|------------|-------------------|--------------|------------------|------|
| Tahun 2013 | 2.509.569.218.343 | 231.4 milyar | 15.03            |      |
| Tahun 2014 | 2.981.068.320.421 | 523.9 milyar | 14.55            | 0.48 |
| Tahun 2015 | 3.496.425.502.266 | 547.5 milyar | 13.16            | 1.39 |
| Tahun 2016 | 3.847.962.965.846 | 547.5 milyar | 13.10            | 0.06 |

|            |                    |            |       |      |
|------------|--------------------|------------|-------|------|
| Tahun 2017 | 4.920.626.776.618  | 800 milyar | 12.36 | 0.79 |
| Tahun 2018 | 5.554.331.177.406  | 1 trilyun  | 11.81 | 0.55 |
| Tahun 2022 | ( berdasar RPJMD ) |            | 7     |      |

Catatan : GK Tahun 2017 Rp 396.271

GK Tahun 2018 RP 414.899

Dan sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang DIY, untuk mendukung kewenangan urusan keistimewaan DIY pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus ( Danais ) yang naik dari tahun ketahun. Terlihat bahwa kenaikan kemampuan keuangan pemda DIY hanya berdampak kecil terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Kenaikan APBD dari tidak berkorelasi secara langsung dengan laju pengurangan kemiskinan. Sejak 2013 sampai 2018 laju penurunan kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai angka 1.39%, dan laju terendah pada tahun 2016 yang sebesar 0.06% dalam satu tahun. Dan secara rata-rata dalam enam tahun terakhir laju penurunan kemiskinan sebesar 0.644% pertahun. Sementara target yang di patok dalam RPJMD 2017 – 2022 adalah menjadi 7 % di tahun 2022. Berat namun



harus optimis. Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dan ikhlas maka bukan hal yang mustahil angka 7% dapat di capai di akhir periode Gubernur tahun 2022 yang akan datang.

Dari grafik di atas terlihat dengan jelas bahwa angka kemiskinan DIY mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun laju penurunan kemiskinan tidak sama dalam setiap tahun anggaran. Kemampuan keuangan daerah yang makin besar tidak serta merta di ikuti dengan kecepatan laju penurunan kemiskinan yang sama. Ada factor-faktor diluar kemampuan keuangan daerah yang perlu di perhatikan. Ketepatan startegi, kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta pengendalian sangat penting mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan DIY.

Menurut BPS ditemukan adanya data yang tidak akurat dalam hal data penduduk miskin. Sehingga diperlukan koreksi data. Secara metodologi salah satu factor penting untuk mengukur angka kemiskinan adalah apa yang disebut Garis Kemiskinan ( GK ). Pada tahun 2018 angka GK DIY sebesar 414.899, naik jika dibandingkan dengan GK tahun 2017 yang berada pada angka 396.271. Jumlah anggota keluarga di DIY rata-rata adalah 4.22 jiwa. Dengan demikian sebagai suatu keluarga dikategorikan miskin adalah ;

$$414.899 \times 4.22 \text{ jiwa} = 1.750.874$$

Porsi terbesar untuk konsumsi ( 71.36%)

Apabila suatu keluarga jumlah pengeluaran kurang dari angka tersebut maka akan di kategorikan sebagai keluarga miskin.

Dengan memahami secara metodologis BPS tersebut maka yang dapat di lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat di tempu dengan pendekatan sebagai berikut;

1. Melakukan perbaikan dan validitas data KK miskin. Sebab berdasar temuan BPS masih banyak keluarga mampu yang masuk dalam data KK miskin.
2. Menaikan Upah Minum Propinsi. UMP propinsi DIY tahun 2018 ini sebesar Rp 1.454.153. UMP berkorelasi signifikan dengan angka kemiskinan
3. Memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap sumber pendapatan baru selain pendapatan tetap yang selama ini di miliki. Contoh keberhasilan Kabupaten Gunungkidul dalam menurunkan angka kemiskinan dengan akses pengelolaan obyek pariwisata kepada warganya. Kabupaten GK menggeser Kulonprogo menjadi keurutan keempat.
4. Menumbuhkan wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pemberdayaan oleh OPD. Jumlah WUB tahun 2018 bertambah 720 . jumlah UKM tahun 2018 sejumlah 259.581 unit
5. Meningkatkan akses pendidikan melalui lama rata-rata sekolah. Dalam LKPI 2018 juga telah di nyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan warga akan semakin punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
6. Peningkatan kualitas ketrampilan dan keahlian siswa lulusan SMK. Berdasar data yang ada selama ini lulusan SMK yang ada serapannya masih tergolong rendah.
7. Mencegah secara serius alih fungsi lahan pertanian. Di laporkan 2812 ha tahun 2016/2017
8. Intervensi dengan bantuan makanan untuk warga miskin

## **INDEKS GINI**

Ketimpangan pendapatan sangat erat kaitannya dengan pendapatan warga DIY. Indeks Gini 2018 sebesar 0.4220 masih terhitung ekstrem. Namun usaha pemerintah untuk menurunkan terus kita dukung. Capaian tahun 2018 yang sebesar 92.26% sehingga tidak tercapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0.3917

Yang perlu dievaluasi sejauhmana usaha untuk menurunkan ketimpangan tersebut. Dari sisi kebijakan wilayah mana yang di jadikan sasaran, dan berapa kegiatan termasuk anggaran yang di alokasikan untuk mengatasi hal tersebut. Harus ada ukuran untuk menilai bahwa telah dilakukan intervensi secara memadai untuk menunjukkan adalah political will dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan tersebut.

## **INDEKS KETIMPANGAN WILAYAH**

Hal yang sama juga berlaku untuk melihat sejauhmana usaha untuk menurunkan ketimpangan wilayah. Hal ini bisa di ukur dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Dan bisa di lihat dari sisi anggaran pemerintah yang dialokasikan pada wilayah yang masih dalam kategori tertinggal. LKPJ 2018 telah memetakan dengan baik bahwa dua wilayah yakni kota Jogja dan Sleman menyumbang 60% dari PDRB DIY dibandingkan tiga wilayah yang lain yakni Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Adanya megaproyek Bandara YIA ( NYIA ) belum secara signifikan mendongkrak angka ketimpangan wilayah. Hasil 2018 sebesar 0.4641 ( atau realisasi 98.23% ) masih belum memperlihatkan perubahan yang berarti. Perlu evaluasi dan rencan akasi yang lebih progresif untuk menurunkan ketimpangan wilayah. Terutama bagaimana mendorong peran investasi masuk ke wilayah-wilayah tertinggal tersebut.

## **IPM**

Capaian IPM DIY tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka IPM 2018 sebesar 79.59 ( realisasi 99.13% ) dari target 80.29. walaupun tidak mencapai target yang perlu di apresiasi adalah IPM di DIY jauh di atas IPM nasional.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk umur panjang dan hidup sehat di ukur dengan Umur Harapan Hidup ( UHH ) yang untuk tahun 2018, UHH DIY tahun 2017 sebesar 74.71. Untuk UHH tahun 2018 mencapai angka 74.87 ( realisasi 99.74% ) dari target 75.06

Untuk Rata Rata Lama Sekolah...data belum ditemukan..yang ada adalah Harapan Lama Sekolah ( HLS ) yang angkanya mencapai 15.55 ( realisasi 100.26% ) dari target 15.51

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sesuai LKPJ 2017 adalah 9.24 tahun. Untuk mendukung program wajar 12 tahun maka rata-rata lama sekolah perlu di prioritaskan. Apalagi hal ini sangat terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan.

Angka pengangguran terbuka ( TPT ) tahun 2018 adalah 3.35% tidak mencapai target yang sebesar 2.78%.

Untuk kinerja urusan kesehatan dapat diberikan catatan bahwa sesuai dengan usaha untuk memperbaiki UHH maka sejumlah parameter kesehatan terus di usahakan seperti; angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada tahun 2018 angka kasus kematian ibu, bayi dan balita masih mengalami

kecenderungan naik. Prevalensi penyakit tidak menular menunjukkan prevalensi melebihi angka nasional.

Angka prevalensi kurang energy protein ( KEP ) tahun 2018 sebesar 7.94%.

### **Kinerja urusan pendidikan DIY**

1. Angka mengulang, putus sekolah dan angka kelulusan
2. Jumlah sekolah, siswa dan guru
3. Jumlah perguruan tinggi dan jumlah beasiswa mahasiswa kurang mampu ( 120/440)
4. Pendidikan non formal ( lembaga, peserta, pendidik )
5. Rasio siswa
6. 3 program pendukung, 11 program urusan pendidikan mencakup 12 kegiatan pendukung dan 289 kegiatan urusan pendidikan. Anggaran pendidikan Rp 525. 907. 430.847 dengan realisasi 471.179.444.442 ( 99.14% )
7. Rata-rata hasil ujian nasional: SMA 62.5 /57.45 ( 108.79%) naik disbanding 2017 yang mencapai 57.39. SMK sebesar 54.77/ 57.65 ( 95% ), khusus SMK nilainya turun disbanding capaian 2017 yakni 57.43
8. Prosentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju ( realisasi 25 atau 419% ) SMK/SMA/SLB hasilnya 18/29/39 atau sangat baik 25/baik 38/cukup 27/kurang 10
9. Jumlah pemuda kader aktif bertambah 217 pemuda ( dari 6567 menjadi 6784 )